

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Paradigma pembangunan ekonomi suatu daerah tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut bersifat inklusif, yaitu mampu meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan (World Bank, 2018). Menurut World Bank (2021) dan teori pertumbuhan ekonomi inklusif dari Ali (2007) konsep pembangunan inklusif menjelaskan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi harus didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap keadilan sosial dan efisiensi pembangunan itu sendiri. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rauniyar dan Kanbur (2010) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat mendukung pembangunan inklusif jika manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

International Monetary Fund (2022) menyatakan bahwa salah satu indikator pembangunan ekonomi inklusif adalah kesetaraan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Mengenai pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan keterlibatan penduduk dalam kegiatannya. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK tidak hanya relevan untuk mengukur kinerja pasar tenaga kerja secara keseluruhan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kesenjangan

partisipasi antar kelompok penduduk, termasuk kesenjangan peran perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase perempuan yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja di Indonesia stagnan di sekitar 50% selama lebih dari lima tahun terakhir, meskipun terjadi peningkatan dalam tingkat pendidikan dan penurunan angka kelahiran yang secara teoritis seharusnya mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja. (Wulan Kurniasari, 2024).

Tabel 1. 1 TPAK Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2018–2024 (Persen)

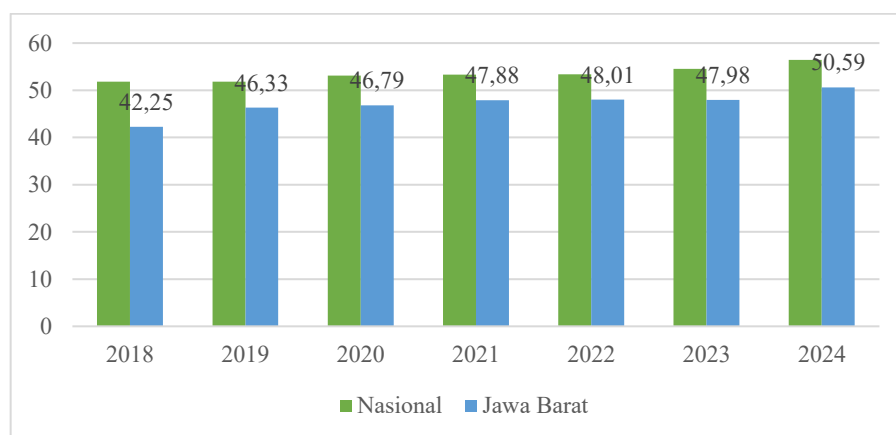
Tahun	TPAK-P (%)	TPAK-L (%)
2018	51,80	82,80
2019	51,81	83,25
2020	53,13	82,41
2021	53,34	82,27
2022	53,41	83,87
2023	54,52	84,26
2024	56,42	84,66

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa TPAK-P di Indonesia lebih rendah daripada TPAK-L pada periode 2018–2024. TPAK-P stagnan di sekitar 50% sedangkan TPAK-L lebih tinggi yang cenderung tetap pada angka 80%. Meskipun demikian, data memperlihatkan bahwa TPAK-P mengalami peningkatan dari 51,80% pada tahun 2018 menjadi 56,42% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam keterlibatan perempuan di pasar tenaga kerja, meskipun laju peningkatannya relatif lambat. Menurut Mankiw (2015) rendahnya partisipasi kerja perempuan berkaitan dengan faktor ekonomi dan sosial yang saling berhubungan. Kesenjangan ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan

sosial yang belum teratasi secara menyeluruh, antara lain beban peran ganda perempuan dalam ranah domestik dan publik serta keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak dan fleksibel.

Kesenjangan partisipasi kerja perempuan tidak hanya tampak secara nasional, tetapi juga terlihat di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kontributor ekonomi nasional dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia yaitu sekitar 50,34 juta jiwa pada tahun 2024 dengan jumlah 24,6 juta jiwa adalah perempuan. Jawa Barat merupakan Provinsi yang tercermin dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah Bekasi, Karawang dan Purwakarta (Pahrul Rodji *et al.*, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

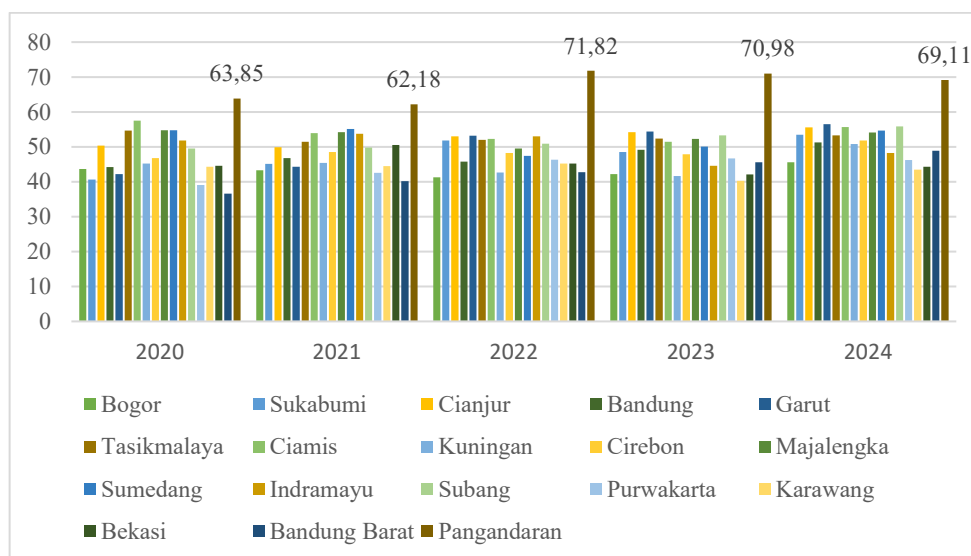
Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Nasional dan Provinsi Jawa Barat 2018-2024 (Persen)

Tingkat partisipasi kerja perempuan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2024 konsisten berada dibawah angka nasional yaitu stagnan di angka 40% sampai dengan 2023 dan 50,59% pada tahun 2024. Menurut BPS (2024) jumlah industri yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu 648.575 unit dimana 8.239 unit merupakan kategori industri sedang – besar dengan penyerapan tenaga kerja perempuan di sektor ini sekitar 27,23% dan laki-laki sebesar 72,77%. Padahal jika

merujuk pada teori Transformasi Struktural pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri cenderung meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja karena adanya peluang kerja yang lebih beragam. Analisis mengenai Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dan kabupaten memiliki perbedaan cukup mencolok baik dari sisi perekonomian maupun geografisnya.

Fokus penelitian ini adalah pada wilayah kabupaten karena kondisi sosial ekonomi yang dimiliki secara struktural berbeda dengan kota. Meskipun dalam lingkup administratif yang sama sebanyak 18 kabupaten secara keseluruhan memiliki basis sosial ekonomi yang berbeda mulai dari industri manufaktur hingga wilayah agraris dengan keterbatasan infrastruktur yang dialami (Hendajany dan Riyadi, 2022). Menurut BPS 2024 perbedaan luas wilayah Jawa Barat juga didominasi oleh kabupaten baik dari sisi geografis maupun jumlah penduduknya. Secara geografis, luas wilayah kabupaten yaitu 35.904 kilometer persegi, sedangkan kota yaitu 1.136,04 kilometer persegi. Lalu, sebanyak 79% penduduk Jawa Barat berada di wilayah Kabupaten, sedangkan sisanya 21% berada di wilayah kota. Selain itu, wilayah kabupaten cenderung memiliki keterbatasan terhadap akses infrastruktur, pendidikan dan fasilitas publik dibanding dengan kota. Karakteristik perekonomian wilayah kabupaten juga cenderung lebih bergantung pada sektor pertanian atau industri skala menengah. Perbedaan tersebut mempengaruhi peluang kerja perempuan, khususnya dalam pekerjaan formal, kualitas pekerjaan, dan keterbatasan transportasi. Sedangkan di wilayah kota umumnya memiliki akses transportasi, pendidikan dan infrastruktur yang lebih

baik, sehingga peluang untuk berpartisipasi dalam pasar kerja lebih baik daripada kabupaten.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada Kabupaten di Jawa Barat 2020-2024 (Persen)

Grafik diatas menunjukkan bahwa kabupaten Pangandaran memiliki TPAK-P tertinggi, yaitu 63,85% pada tahun 2020 dan konsisten menjadi yang tertinggi pada tahun-tahun selanjutnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja di Pangandaran relatif lebih kuat, baik dari sektor jasa, perdagangan, maupun pekerjaan informal yang dominan di wilayah pesisir pantai dan pariwisata (Sirad *et al.*, 2025). Sedangkan pada 2020 dan 2021 kabupaten Bandung Barat memiliki TPAK-P terendah dibandingkan kabupaten lainnya yang disebabkan oleh hambatan struktural yang ada di wilayah tersebut (Prihatiningtyastuti, 2020). Kabupaten dengan sektor industri yang kuat seperti Karawang mengalami penurunan TPAK-P tahun 2023 dan Bekasi tahun 2022, disebabkan oleh tingginya kompetensi tenaga kerja yang menjadikan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal terhambat. Sementara itu, kabupaten yang

memiliki struktur ekonomi campuran dengan dominasi sektor pertanian yang kuat yaitu Cianjur, Tasikmalaya, dan Majalengka mengalami penurunan TPAK-P tahun 2021, Sukabumi tahun 2023 serta Kuningan, Sumedang, dan Indramayu tahun 2022. Hal ini disebabkan karena perubahan kesempatan kerja di sektor jasa, perdagangan, dan kegiatan informal yang berpengaruh pada mobilitas masyarakat dan tekanan ekonomi rumah tangga. Namun di sisi lain, kabupaten Garut mengalami peningkatan sepanjang periode penelitian. Hal ini berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pasar kerja yang stabil terutama di sektor pertanian, rumah tangga, dan perdagangan lokal yang adaptif terhadap perubahan ekonomi (Putri dan Santoso, 2023). Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perbedaan TPAK-P pada kabupaten di Jawa Barat tidak dipengaruhi oleh satu faktor. Namun, karakteristik ekonomi daerah, ketergantungan pada sektor tertentu, dan fleksibilitas perempuan dalam merespon perubahan kondisi pasar tenaga kerja dari tahun ke tahun.

Merujuk pada perspektif *feminisme* ekonomi dari Gilman (1898), bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja bukan hanya disebabkan oleh pilihan individual, melainkan juga karena kondisi sosial dan ekonomi yang menempatkan perempuan pada peran domestik. Pembagian peran antar laki-laki dan perempuan ini pada akhirnya akan membatasi kesempatan perempuan untuk mendapatkan akses ke pekerjaan dengan upah layak dan produktif. Namun di sisi lain Gilman menyoroti bahwa pendidikan dan kebijakan merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan perempuan di pasar kerja terutama pekerjaan formal. Sejalan dengan ini, teori *Dual Labor Market* dari Doeringer dan Piore (1970) yang

membagi pasar tenaga kerja menjadi dua sektor utama yaitu primer dan sekunder, dimana perempuan cenderung lebih banyak berada pada sektor sekunder dengan upah rendah dan pekerjaan yang tidak stabil, hal ini berkaitan dengan adanya stereotip gender yang mengakibatkan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam sektor primer sangat terbatas.

Dalam konteks ini, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan sebagai indikator yang menunjukkan sejauh mana hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ekonomi, politik serta pengambilan keputusan dapat diminimalkan. Secara teoritis, peningkatan IDG mencerminkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pasar kerja khususnya pekerjaan formal meningkat. Sejalan dengan ini penelitian yang dilakukan oleh Widyanawati (2025) menyebutkan bahwa wilayah dengan tingkat IDG yang tinggi menunjukan bahwa akses yang dimiliki perempuan untuk memasuki ranah publik jauh lebih baik, sehingga meningkatnya pemberdayaan perempuan pada akhirnya akan diikuti oleh peningkatan kesempatan mereka untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, konsep *gender empowerment* yang diperkenalkan oleh UNDP menggarisbawahi pemberdayaan perempuan dianggap sebagai usaha dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka untuk berpartisipasi, berkontribusi dan mengambil keputusan di bidang ekonomi, sosial ataupun politik.

Pembagian pasar kerja sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori *Dual Labor Market* menjelaskan bahwa kemampuan tenaga kerja dalam mengakses jenis pekerjaan yang stabil dan upah layak sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas individu itu sendiri. Dalam konteks ini, kondisi sumber daya manusia menjadi

faktor penting untuk menentukan posisi individu dalam struktur pasar kerja. Pendapat ini sejalan dengan teori *human capital* dari Becker (1992) yang menyatakan mengenai investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan pada gilirannya mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan individu di masa depan. Ketika tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan yang dimiliki perempuan lebih baik maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga meningkat.

Kualitas *human capital* tersebut direpresentasikan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana IPM yang digunakan dalam penelitian secara khusus adalah IPM perempuan. IPM perempuan merujuk pada bagaimana masyarakat perempuan mampu mengakses hasil pembangunan manusia melalui tiga dimensi yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Standar hidup layak. Hal ini didukung dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan seperti harapan lama sekolah dan harapan hidup yang terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap IPM (Hendajany dan Riyadi, 2022).

Keputusan perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja juga tidak terlepas dari faktor demografis yang ada. Becker (1965) dalam teori *New Home Economics* berpendapat bahwa seorang perempuan memiliki keputusan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana kondisi pasar tenaga kerja, tetapi juga karena hasil dari keputusan bersama di tingkat rumah tangga serta kesejahteraan anggotanya melalui alokasi waktu antara kegiatan produktif (bekerja di pasar) dan kegiatan domestik (produksi rumah tangga). Pendapatan kepala keluarga, jumlah anak dan faktor sosial menjadi

pertimbangan utama dalam menentukan partisipasi kerja perempuan. Sejalan dengan pandangan tersebut, *Labor Force Theory* dari Mincer *et al.*, (2016) menyebutkan bahwa kombinasi dari faktor sosial, ekonomi dan demografis menjadi pengaruh keputusan perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Faktor demografis yang mempengaruhi partisipasi perempuan dipasar tenaga kerja tercermin dalam rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan proporsi penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif. Menurut Effendy *et al.*, (2020) wilayah dengan karakteristik pertanian seperti Ciamis dan Garut cenderung memiliki angka kelahiran lebih tinggi. Tingginya beban domestik yang umumnya dibebankan pada perempuan seringkali mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam pasar kerja. Perempuan harus mempertimbangkan antara masuk pasar kerja guna membantu mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga atau keluar dari pasar kerja untuk menjalankan tanggung jawab perawatan terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu pengaruh rasio ketergantungan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan bersifat *kompleks* tergantung bagaimana kondisi ekonomi keluarga serta bagaimana kondisi pasar kerja yang tersedia.

Partisipasi angkatan kerja perempuan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wilayah yang bersangkutan. Menurut teori Transformasi Struktural dari Lewis (1954) dan model Pertumbuhan Neoklasik dari Solow (1956) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perubahan karakteristik perekonomian dari pertanian ke arah industri sehingga secara teoritis seharusnya

mampu menciptakan dan menawarkan jenis pekerjaan yang lebih beragam termasuk bagi perempuan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita digunakan dalam penelitian sebagai proxy dari faktor ekonomi yang mencerminkan tingkat daya beli dan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Secara teori peningkatan PDRB per kapita menunjukkan membaiknya kapasitas ekonomi daerah yang seharusnya berpotensi mendorong perluasan aktivitas produksi serta penciptaan lapangan kerja yang lebih beragam (Janah, 2022). Wilayah dengan PDRB per kapita tinggi yang berada pada kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2024 yaitu wilayah dengan karakteristik perekonomian dengan dominasi industri seperti Karawang dan Bekasi sedangkan PDRB per kapita pada tahun 2024 yang terendah berada di wilayah dengan dominasi perekonomian pertanian seperti kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur (BPS, 2024).

Penelitian yang berkaitan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita *et al.*, (2024) menemukan bahwa indeks pemberdayaan gender memiliki pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Selanjutnya Armaatus *et al.*, (2024) menemukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Alghamdi dan Shaheen (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa rasio ketergantungan memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Serta Voumik *et al.*, (2023) menemukan bahwa produk domestik bruto memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi kerja perempuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan pada kabupaten di Jawa Barat. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai partisipasi angkatan kerja perempuan, namun penggunaan indikator yang secara spesifik merepresentasikan kondisi perempuan belum banyak dioptimalkan dalam penelitian terdahulu khususnya dalam konteks wilayah kabupaten di Jawa Barat. Maka dari itu penelitian ini berjudul “Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Ketergantungan dan PDRB Per Kapita terhadap TPAK Perempuan (Studi Empiris pada Kabupaten di Jawa Barat 2018 – 2024)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Ketergantungan dan PDRB Per Kapita secara parsial terhadap TPAK Perempuan pada kabupaten di Jawa Barat tahun 2018-2024?
2. Bagaimana pengaruh Indeks pemberdayaan gender, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Ketergantungan dan PDRB Per Kapita secara bersama-sama terhadap TPAK Perempuan pada kabupaten di Jawa Barat tahun 2018-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Ketergantungan dan PDRB Per Kapita secara parsial terhadap TPAK Perempuan pada kabupaten di Jawa Barat tahun 2018-2024.
2. Mengetahui Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Ketergantungan dan PDRB Per Kapita secara bersama-sama terhadap TPAK Perempuan pada kabupaten di Jawa Barat tahun 2018-2024.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi pembangunan dan studi ketenagakerjaan dengan menyediakan bukti empiris mengenai variabel independen yang digunakan dalam mempengaruhi TPAK perempuan di tingkat kabupaten. Hasil penelitian dapat menambah literatur serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kerja perempuan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap isu gender dan ketenagakerjaan perempuan.
2. Organisasi atau lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran.
3. Akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian yang berkaitan dengan ketenagakerjaan berbasis gender.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di 18 wilayah kabupaten Provinsi Jawa Barat antara lain yaitu: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung, Bekasi, Bandung Barat dan Pangandaran.

1.5.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan dan mulai diterbitkannya SK pembimbing. Adapun rencana jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2
Jadwal Penelitian

[illegible]